

Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pusakajaya Selatan Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang

Norma Husnia ^{1*}; Usep Dayat ²; Kariena Febriantini ³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

*Correspondence : normahusnia58@gmail.com

Date of submission: 14 June 2026 | Date of acceptance: 29 July 2026

ABSTRAK

Peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan masih menghadapi berbagai tantangan meskipun memiliki potensi lokal yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Pusakajaya Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan Teori Strategi G.R. Terry, yang mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, actuating, and controlling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa tersebut diimplementasikan melalui pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, pengembangan ekonomi non-pertanian dan transparansi informasi masih belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diversifikasi ekonomi, penguatan peran BUMDes, dan peningkatan transparansi diperlukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Kata Kunci

Strategi Pemerintah Desa, Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT

Improving the well-being of rural communities still faces various challenges despite their significant local potential. This study aims to analyze the strategies implemented by the Pusakajaya Selatan Village Government to improve community welfare. This study employs a qualitative method using a case study approach through interviews, observations, and documentation, analyzed using G.R. Terry's Theory of Strategy, which encompasses the management functions of *planning, organizing, actuating, and controlling*. The results show that the village government's strategies were implemented through infrastructure development, strengthening the agricultural sector, and managing the Village-Owned Enterprise (BUMDes). However, the development of the non-agricultural economy and information transparency remain suboptimal. This study concludes that economic diversification, strengthening the role of BUMDes, and improving transparency are necessary to support more equitable community welfare.

Keywords

Village Governance Strategies, Community Welfare

Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kemajuan perekonomian di kawasan pedesaan turut berperan penting dalam mendukung kondisi ekonomi nasional karena keadaan ekonomi desa memberikan pengaruh terhadap perekonomian negara secara keseluruhan (Rakhmadian & Arif, 2023). Dalam konteks pembangunan nasional, desa tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai pelaku aktif yang memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian lokal. Desa memperoleh otonomi asli yang diwujudkan dalam bentuk kewenangan menyusun peraturan desa, mengelola keuangan, serta merencanakan pembangunan sesuai kebutuhan lokal, sehingga desa mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri (Dimuru & Madjid, 2025).

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek utama pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di era otonomi daerah (Fatam & Kusmiady, 2025). Oleh karena itu, pemerintah telah menerapkan berbagai program dan kebijakan untuk mendorong kemandirian desa melalui penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi yang dimiliki setiap desa.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui APBD kabupaten/kota kepada desa. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kondisi serta potensi lokal (Hermawan & Suliyono, 2026). Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan yang bersifat *top-down*, melainkan sebagai aktor utama yang memiliki ruang untuk berinovasi, berkolaborasi, dan mengoptimalkan potensi lokal (Adriani, 2024). Tujuan utama dari Dana Desa adalah memperkuat pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, mempercepat pembangunan infrastruktur desa, menutup kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta memperkuat kapasitas masyarakat desa sebagai aktor pembangunan (Ananta et al., 2024). Dengan demikian, keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan, tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan (Rahayu et al., 2025).

Prioritas penggunaannya diarahkan pada program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta harus selaras dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) (Hermawan & Suliyono, 2026). Dana Desa tidak hanya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi juga harus diarahkan pada program pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan potensi ekonomi setempat yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa (Suryani, T., 2025). Meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak desa yang menghadapi berbagai persoalan, seperti ketimpangan kesejahteraan, keterbatasan akses ekonomi, serta belum optimalnya pengelolaan potensi lokal sehingga tujuan pembangunan desa belum sepenuhnya tercapai.

Salah satu instrumen yang diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015. Regulasi tersebut menegaskan bahwa BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis desa, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program pengembangan UMKM dan BUMDes merupakan instrumen untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus menjadi katup pengaman dalam menghadapi situasi krisis ekonomi (Fathah & Safitri, 2022).

Pengelolaan BUMDes dilakukan oleh masyarakat desa, dari desa, dan untuk desa, sehingga keberadaannya diharapkan mampu mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Subhan, 2022). Selain itu, BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa, pelayanan, dan usaha lainnya demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Umatin et al., 2026). Kemudian, BUMDes juga memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan pemanfaatan aset desa, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas jaringan usaha dan pasar (Minang et al., 2021).

Menurut data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) serta Badan Pusat Statistik tahun 2025, jumlah BUMDes di Indonesia hingga Juni 2024 telah mencapai 65.941 unit. Namun, dari jumlah tersebut hanya sekitar 75,8% yang masih aktif, sedangkan 24,2% lainnya tidak aktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah BUMDes terus meningkat, efektivitas pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Mulianingsih (2022) menyatakan bahwa BUMDes berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pengelolaan usaha yang berbasis kebutuhan dan potensi lokal. Namun, dalam implementasinya, pengelolaan BUMDes di berbagai

daerah masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, maupun partisipasi masyarakat.

Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya diukur dari capaian pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum, tetapi juga dari kemampuan pemerintah desa dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan (Sakdiyah et al., 2022). Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan (Saputra et al., 2024). Namun demikian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), ekonomi Indonesia pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03%, sedangkan tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan masih mencapai 11,79% atau lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang sebesar 7,09%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, salah satu misi pembangunan nasional adalah membangun desa melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat kelembagaan ekonomi, mengembangkan rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia sebagai dasar pertumbuhan ekonomi desa (Umatin et al., 2026).

Desa Pusakajaya Selatan merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar di sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), luas panen komoditas padi di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 10,20 juta hektare dengan produksi Gabah Kering Giling (GKG) sekitar 53,63 juta ton atau setara dengan sekitar 30,90 juta ton beras (Laila et al., 2025). Selain berperan sebagai penyedia pangan nasional, usaha tani komoditas padi juga menjadi sumber pendapatan utama masyarakat sehingga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Kondisi geografis Desa Pusakajaya Selatan yang didominasi oleh lahan persawahan menjadikan sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian masyarakat. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya berhasil mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Sebagian besar penduduk Desa Pusakajaya Selatan bekerja sebagai buruh tani, yaitu menggarap lahan milik orang lain tanpa memiliki lahan pertanian sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan masyarakat relatif terbatas, ketergantungan terhadap pemilik lahan masih tinggi, serta rendahnya kontrol masyarakat terhadap hasil produksi pertanian.

Akibatnya, meskipun sektor pertanian di desa ini tergolong berkembang, tingkat kesejahteraan masyarakat masih relatif rendah. Menurut Farida et al. (2023), kondisi tersebut menunjukkan bahwa desa masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kemandirian sosial dan ekonomi sehingga diperlukan upaya yang sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Fachruzzaman

et al. (2023) menjelaskan bahwa BUMDes memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi. Namun, di Desa Pusakajaya Selatan peran tersebut belum sepenuhnya optimal karena pengembangan usaha desa masih berfokus pada sektor pertanian, sedangkan potensi ekonomi nonpertanian, seperti UMKM dan usaha rumah tangga, belum berkembang secara maksimal.

Secara administratif, Desa Pusakajaya Selatan terletak di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, dengan luas wilayah sekitar 5.272.000 m² dan jumlah penduduk sebanyak 3.566 jiwa. Berdasarkan data Pemerintah Desa Pusakajaya Selatan, terdapat 1.337 kepala keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang bervariasi, mulai dari keluarga mampu hingga keluarga sangat miskin sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Kepala Keluarga Di Desa Pusakajaya Selatan Tahun 2026

No.	Jumlah Kepala Keluarga	Keterangan	%
1.	27 Kepala Keluarga	Nonaktif	2,02%
2.	69 Kepala Keluarga	Belum Peningkatan	5,16%
3.	144 Kepala Keluarga	Sangat Miskin	10,77%
4.	293 Kepala Keluarga	Miskin	21,91%
5.	143 Kepala Keluarga	Rentan Miskin	10,70%
6.	139 Kepala Keluarga	Hampir Miskin	10,40%
7.	70 Kepala Keluarga	Menengah Bawah	5,24%
8.	452 Kepala Keluarga	Mampu	33,81%
Total : 1.337 Kepala Keluarga			

Sumber: Catatan Kantor Desa Pusakajaya Selatan, 2026.

Berdasarkan tabel 1 tersebut, terlihat bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Pusakajaya Selatan masih menunjukkan adanya ketimpangan. Meskipun 33,81% keluarga tergolong mampu, masih terdapat 21,91% keluarga miskin dan 10,77% keluarga sangat miskin. Selain itu, kelompok rentan miskin dan hampir miskin juga masih memiliki proporsi yang cukup besar. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi desa dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemerintah desa yang mampu mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat kelembagaan ekonomi desa, serta mendorong pemberdayaan masyarakat agar kesejahteraan dapat meningkat secara berkelanjutan.

Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai studi sebelumnya, sebagian besar penelitian mengenai strategi pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berfokus pada pelaksanaan program pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan potensi lokal, serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya untuk memajukan perekonomian lokal. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih menekankan pada deskripsi pelaksanaan program atau kebijakan, sehingga belum banyak

mengevaluasi efektivitas strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis implementasi strategi pemerintah desa melalui fungsi-fungsi manajemen dalam mengoptimalkan potensi desa serta peran BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam konteks desa agraris.

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada identifikasi strategi pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mengevaluasi efektivitas implementasi strategi tersebut melalui perspektif fungsi manajemen G.R. Terry (Sukarna, 2011) (*planning, organizing, actuating, dan controlling*). Berbeda dengan teori-teori strategi pemerintahan yang lebih berorientasi pada aspek kebijakan, atau teori-teori pemberdayaan masyarakat yang lebih menekankan pada partisipasi masyarakat, pendekatan ini memungkinkan dilakukannya analisis terhadap keseluruhan proses manajerial pemerintah desa, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan hingga tahap pemantauan. Oleh karena itu, teori ini dianggap relevan untuk menganalisis implementasi strategi Pemerintah Desa Pusakajaya Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi desa dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Desa Pusakajaya Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi desa dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari perspektif fungsi-fungsi manajemen serta mengevaluasi efektivitas strategi-strategi tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris untuk memperkaya kajian tata kelola desa, khususnya terkait penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan potensi desa agraris.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus deskriptif yang bertujuan memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai strategi Pemerintah Desa Pusakajaya Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengumpulan data secara langsung di lapangan serta mengkaji makna, proses, dan konteks yang mendasarinya. Menurut Creswell (2016) studi kasus merupakan penelitian yang menyelidiki secara mendalam suatu kejadian, tindakan, proses, atau program dengan memanfaatkan berbagai sumber data selama periode tertentu. Kekhususan penelitian ini terletak pada kondisi Desa Pusakajaya Selatan yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, namun tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih relatif rendah karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai buruh tani dan pengembangan sektor ekonomi nonpertanian belum optimal. Penelitian dilaksanakan pada Januari–Juni 2026,

meliputi tahap observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, analisis data, dan verifikasi temuan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Menurut Sarwono (2006), data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, sedangkan data sekunder merupakan data yang telah tersedia dan diperoleh melalui dokumen maupun sumber lain yang relevan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan dengan para informan penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari Profil Desa Pusakajaya Selatan, Peraturan Desa, dokumen RKPDDes dan APBDDes Tahun 2026, Laporan Keuangan BUMDes, Data Panen Desa Pusakajaya Selatan Tahun 2024–2025, serta berbagai literatur yang relevan.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2023), purposive sampling merupakan teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu, yaitu memilih individu yang dianggap paling mengetahui informasi yang dibutuhkan peneliti. Berdasarkan teknik tersebut, penelitian ini melibatkan 10 informan yang terdiri atas 1 Kepala Desa, 1 Ketua BUMDes, 1 Penyuluh Pertanian, 2 anggota Kelompok Tani BUMDes Karya Mekar, dan 5 masyarakat Desa Pusakajaya Selatan. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaksanaan program pemerintah desa yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun lebih jelasnya tentang daftar informan yang diharapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Daftar Informan

No.	Nama Informan	Jumlah	Informasi yang diharapkan	Kode
1.	Kepala Desa	1	Data program desa yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat prioritas penggunaan anggaran, serta pelaksanaan dan evaluasi program desa.	HG
2.	Ketua BUMDes	1	Data unit usaha BUMDes, perkembangan usaha, kendala pengelolaan, serta kondisi kontribusi BUMDes terhadap pendapatan masyarakat.	JR
3.	Penyuluh Pertanian	1	Data kondisi pertanian masyarakat, tingkat produksi dan pendapatan petani, serta kendala dalam meningkatkan hasil pertanian.	SR
4.	Kelompok Petani	2	Informasi terkait pendapatan petani, kondisi kerja sebagai buruh tani, serta pengalaman terhadap bantuan atau program dari desa.	SI, SY
5.	Masyarakat	5	Informasi mengenai kondisi ekonomi rumah tangga, akses terhadap pekerjaan atau usaha, serta perubahan kesejahteraan yang dirasakan.	LY, PD, EK, BN, TN
Jumlah		10		

Sumber: Oleh Penulis, 2026.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2016) pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan program pemerintah desa. Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator fungsi manajemen (*planning, organizing, actuating, dan controlling*) untuk memperoleh informasi mengenai strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memvalidasi hasil wawancara serta observasi melalui dokumen perencanaan desa, laporan kegiatan BUMDes, arsip peraturan desa, dan dokumentasi kegiatan pembangunan.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih serta memfokuskan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi berdasarkan indikator fungsi manajemen sehingga memudahkan peneliti mengidentifikasi pola, hubungan, dan temuan penelitian. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi secara terus-menerus hingga diperoleh temuan yang kredibel.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Menurut Afiyanti (2014), triangulasi digunakan untuk memvalidasi temuan penelitian kualitatif. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari Kepala Desa, Ketua BUMDes, Penyuluh Pertanian, kelompok tani, dan masyarakat, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan fungsi manajemen utama yang menjadi landasan pelaksanaan suatu program. Dalam penelitian ini, aspek perencanaan digunakan untuk mengkaji bagaimana pemerintah Desa Pusakajaya Selatan merencanakan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menentukan prioritas program, mengembangkan potensi desa dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Berdasarkan temuan penelitian, ditemukan bahwa perencanaan program di Desa Pusakajaya Selatan masih berfokus pada pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian. Hal ini diperjelas oleh Sekretaris Desa Pusakajaya Selatan pada wawancara 28 April 2026, Sekretaris Desa menyatakan:

"Untuk program yang direncanakan untuk saat ini kita lebih ke infrastruktur seperti jalan. Contohnya jalan setapak untuk mempermudah petani ke sawah, karena memang mayoritas masyarakat di sini petani."

Kesesuaian program-program pembangunan ini semakin diperkuat oleh pernyataan dari SI, pada tanggal 19 Mei 2026, yang menyatakan:

"Masalah jalan memang perlu diutamakan, karena harapan petani memiliki akses jalan bagus menuju sawah. Ketika musim hujan, menyulitkan petani karena tidak bisa dilewati."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembangunan jalan setapak merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat, terutama bagi para petani yang kegiatan ekonominya bergantung pada sektor pertanian. Jika dianalisis menggunakan teori G.R. Terry, fungsi perencanaan telah berjalan karena pemerintah desa telah menetapkan tujuan, sasaran, serta prioritas pembangunan berdasarkan kondisi masyarakat. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara dokumen perencanaan dengan implementasi program.

Meskipun RKPDes Tahun 2026 telah memuat program pengembangan UMKM dan pemberdayaan ekonomi, implementasi di lapangan masih didominasi pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan program. Berdasarkan perspektif G.R. Terry, fungsi perencanaan telah berjalan karena pemerintah desa menetapkan prioritas sesuai kondisi masyarakat. Namun, pengembangan potensi ekonomi nonpertanian masih belum menjadi fokus utama sehingga diversifikasi sumber pendapatan masyarakat belum optimal.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah proses penugasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta koordinasi sumber daya yang tersedia bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, aspek *Organizing* (Pengorganisasian) digunakan untuk mengkaji bagaimana Pemerintah Desa Pusakajaya Selatan membagi tugas di antara lembaga-lembaga desa, menjalin koordinasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kelompok masyarakat, serta memobilisasi partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengorganisasian dalam penelitian ini mengkaji bagaimana Pemerintah Desa Pusakajaya Selatan membagi peran, mengoordinasikan lembaga desa, serta menyediakan sumber daya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, Sekretaris Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa membagi tugas kepada BPD sebagai pengawas program, Linmas dalam menjaga ketertiban, serta melakukan koordinasi rutin melalui rapat mingguan dan Musrenbang, sementara BUMDes bertindak sebagai pelaksana kegiatan ekonomi desa. Selain itu, pemerintah desa mengalokasikan penyertaan modal sebesar 20% dari Alokasi Dana Desa atau sekitar Rp.212.000.000 kepada BUMDes untuk mendukung program ketahanan pangan, yang digunakan untuk penyewaan lahan seluas 10 hektare serta pembiayaan produksi pertanian. Pelaksanaan program tersebut juga melibatkan masyarakat sebagai pengelola lahan pertanian. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris BUMDes Karya Mekar Desa Pusakajaya Selatan pada wawancara tanggal 28 April 2026 yang menyatakan:

“Untuk saat ini 8 hektar melibatkan beberapa orang untuk mengurus perairannya, dan rata-rata untuk per 1 hektar orang. Jadi mereka bertanggung jawab mulai dari pengolahan menggunakan traktor hingga proses panen selesai.”

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan masyarakat. Salah satu petani penggarap menyatakan:

“cukup baik komunikasi petani dengan pemerintah desa bantuannya lancar, cukup baik sampai saat ini, kalau untuk ke depannya tidak tahu, tapi kalau sekarang sudah dua kali bersawah cukup baik kerja samanya, ada sedikit bantuan juga untuk para penggarap cukup kalau untuk sekarang, kebutuhan lumayan tercukupi ada penghasilan.”

Hasil wawancara menunjukkan adanya konsistensi informasi antara pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat terkait koordinasi serta keterlibatan masyarakat dalam program ketahanan pangan. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya dioptimalkan karena BUMDes pernah mengalami masa tidak aktif, sehingga menghambat berbagai program ekonomi desa untuk berkembang secara maksimal. Selain itu, pelaksanaan program masih sangat terfokus pada sektor pertanian, sehingga keterlibatan kelompok masyarakat di luar sektor tersebut seperti pelaku UMKM masih relatif terbatas.

Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa pengorganisasian pembangunan desa masih berorientasi pada karakteristik ekonomi Desa Pusakajaya Selatan, yang didominasi oleh sektor pertanian. Akibatnya, alokasi sumber daya, koordinasi antarlembaga, dan pelaksanaan program sebagian besar diarahkan pada pengembangan sektor pertanian, sementara potensi ekonomi non-pertanian belum mendapat perhatian yang sepadan. Akibatnya, peluang untuk mendiversifikasi sumber pendapatan masyarakat menjadi terbatas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat belum dirasakan secara merata.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathah dan Safitri (2022), yang menyatakan bahwa program pengembangan UMKM dan BUMDes berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus berperan sebagai jaring pengaman selama krisis ekonomi. Dalam penelitian ini, pemerintah Desa Pusakajaya Selatan telah memperkuat peran BUMDes dengan mengalokasikan 20% dari Alokasi Dana Desa sebagai modal untuk mendukung program ketahanan pangan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi ini belum dilaksanakan secara optimal karena pengelolaan BUMDes masih terfokus pada sektor pertanian, sementara pengembangan UMKM dan potensi ekonomi non-pertanian belum diprioritaskan. Situasi ini mengakibatkan manfaat program tidak dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat, sehingga kontribusi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih terbatas.

Berdasarkan teori fungsi manajemen G.R. Terry (Sukarna, 2011), pengorganisasian adalah proses pembagian tugas, perencanaan kegiatan, penyediaan sumber daya, dan penetapan garis kewenangan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks Desa Pusakajaya Selatan, unsur-unsur tersebut telah

diimplementasikan melalui kolaborasi antara pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penyuluh pertanian, dan kelompok tani. Meskipun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas proses organisasi tersebut masih perlu ditingkatkan dengan memperluas keterlibatan masyarakat dan mengembangkan program-program ekonomi di luar sektor pertanian agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara lebih efektif.

3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan strategi Pemerintah Desa Pusakajaya Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor pertanian, serta revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pelaksanaan program disesuaikan dengan karakteristik masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani sehingga sebagian besar anggaran dan program pembangunan diarahkan pada sektor pertanian. Hal ini di jelaskan oleh Sekretaris Desa melalui wawancara pada 28 April 2026 yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas karena dinilai paling mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Beliau menyatakan:

"Kalau program yang sudah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya sudah dilaksanakannya infrastruktur. Karena kalau untuk difokuskan ke hal lain, sebenarnya belum ada yang mampu menyerap tenaga kerja, meskipun ada potensi tapi memang kesulitannya di masyarakatnya juga, yang di mana masyarakatnya di sini masih belum bisa di bilang masyarakat yang mandiri."

Pelaksanaan program ini didukung oleh BUMDes Karya Mekar, yang menerima kontribusi modal sebesar 20% dari Alokasi Dana Desa senilai sekitar Rp212.370.000 untuk melaksanakan program ketahanan pangan. Dana tersebut digunakan untuk menyewa 10 hektar sawah, membiayai proses budidaya hingga panen, dan menghasilkan laba sekitar Rp41.000.000 pada musim panen pertama. Laba ini diinvestasikan kembali untuk meningkatkan modal BUMDes, menyumbang ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta membiayai gaji pengelola dan biaya operasional. Selain itu, anggota masyarakat yang terlibat menerima upah sekitar Rp2.000.000 per hektar, sedangkan tugas harian seperti pemupukan dan penyemprotan diberi kompensasi sekitar Rp65.000–Rp100.000 per kegiatan.

Hasil program ini juga tercermin dalam hasil panen kelompok tani di Desa Pusakajaya Selatan pada tahun 2025. Data menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok tani berhasil memanen hasil panen sesuai dengan luas lahan yang mereka kelola, meskipun beberapa petak lahan masih mengalami gagal panen. Data hasil panen disajikan dalam tabel 3.

Data pada tabel 3 menunjukkan bahwa luas lahan yang dipanen mencapai 552 hektar dari total 603 hektar lahan sawah, sementara 51 hektar mengalami gagal

panen. Temuan ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian tetap menjadi andalan perekonomian masyarakat; oleh karena itu, pemerintah desa memprioritaskan pelaksanaan program ketahanan pangan melalui pengembangan infrastruktur pertanian dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Meskipun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya dioptimalkan, karena manfaat dari program-program tersebut masih terutama dirasakan oleh mereka yang terlibat langsung dalam sektor pertanian, sementara pengembangan usaha non-pertanian masih terbatas.

Tabel 3. Hasil Panen Desa Pusakajaya Selatan 2025

No.	Kelompok Tani	LBS (Ha)	Luas Panen (Ha)	Puso (Ha)
1.	Gemar tani	72	72	0
2.	Pusaka tani	81	81	0
3.	Fajar bulan	86	73	13
4.	Surya tani	84	70	14
5.	Munjul tani	58	52	6
6.	Munggaran jaya	52	47	5
7.	Jaya mekar	92	83	9
8.	Sinar maju	78	74	4
Jumlah		603	552	51

Sumber: Data Panen Desa Pusakajaya Selatan, 2025.

Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi implementasi belum sepenuhnya dioptimalkan. Meskipun program-program pertanian memberikan manfaat bagi petani, sebagian besar program pembangunan masih berfokus pada sektor pertanian. Akibatnya, kelompok masyarakat di luar sektor ini terutama pelaku UMKM belum menerima dukungan atau pemberdayaan yang berkelanjutan. Selain itu, pejabat desa mencatat bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelatihan kewirausahaan telah menyebabkan beberapa program pemberdayaan ekonomi sebelumnya gagal berkembang sesuai harapan. Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi strategi yang belum optimal dipengaruhi tidak hanya oleh keterbatasan program pemerintah, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya manusia lokal serta kurangnya diversifikasi ekonomi di desa-desa.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Al Fajar et al., (2025) bahwa implementasi strategi untuk meningkatkan kesejahteraan harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyesuaian tersebut telah menyebabkan pembangunan terlalu terkonsentrasi pada sektor pertanian, sehingga potensi ekonomi lainnya khususnya UMKM belum berkembang secara optimal. Situasi ini juga mengungkapkan bahwa, meskipun pelaksanaan program telah memberikan manfaat bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan belum dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat.

4. Controlling (Pengawasan)

Pengawasan adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Terry menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses mengukur pelaksanaan kegiatan, membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan korektif jika ditemukan penyimpangan (Sukarna, 2011). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dilaksanakan tidak hanya melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi, tetapi juga melalui penerapan transparansi informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dengan demikian, pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program tetap sejalan dengan RPJMDes, dapat dievaluasi secara berkala, dan diinformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dari pemerintah desa.

Berdasarkan temuan penelitian, pengawasan terhadap pelaksanaan program di Desa Pusakajaya Selatan dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan berbagai unsur, yaitu pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah kecamatan, pengelola BUMDes, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara umum. Keterlibatan BPD dalam proses pengawasan ditegaskan oleh Sekretaris Desa Pusakajaya Selatan, HG, dalam wawancara pada 28 April 2026. Ia menyatakan bahwa,

"Kalau untuk ini, kami bekerja sama dengan BPD, BPD sebagai sosial kontrol yang mengawasi program yang dijalankan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BPD memiliki peran penting sebagai lembaga kontrol sosial yang memastikan program desa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain BPD, pemerintah kecamatan juga turut terlibat dalam memantau pelaksanaan program desa. HG menjelaskan bahwa,

"Kalau selain BPD ada pengawas dari kecamatan juga ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan program yang dijalankan."

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan secara internal oleh lembaga-lembaga di tingkat desa, tetapi juga melibatkan pemerintah pada tingkat kecamatan sebagai bagian dari mekanisme pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Keterlibatan berbagai unsur dalam pengawasan tersebut diperkuat oleh pernyataan Sekretaris BUMDes Karya Mekar Desa Pusakajaya Selatan, JR, dalam wawancara pada 28 April 2026. Ia menyatakan bahwa, BPD, pemerintah desa, tokoh masyarakat juga ikut mengawasi

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa proses pengawasan dilaksanakan secara partisipatif dan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemerintahan, tetapi juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan program juga terlihat dari keterbukaan informasi mengenai kegiatan pembangunan desa. Berdasarkan wawancara dengan PD menyatakan bahwa

"Tentu saja, karena setiap ada pelaksanaan pembangunan di Desa Pusakajaya Selatan semua masyarakat tahu, jadi jelas ikut mengawasi."

Dengan demikian, pengawasan terhadap pelaksanaan program di Desa Pusakajaya Selatan dapat dipahami sebagai proses kolaboratif yang melibatkan lembaga pemerintahan dan masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi bentuk kontrol bersama untuk memastikan program berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Desa dikuatkan oleh Sekretaris BUMDes dan masyarakat. Konsistensi informasi ini menunjukkan bahwa pengawasan pelaksanaan program dilakukan secara kolaboratif, dengan melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah kecamatan, BUMDes, dan masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selain pemantauan dan evaluasi, fungsi pengendalian juga diwujudkan melalui penerapan transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pelaksanaan program. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan program dan pemanfaatan anggaran, sehingga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses pemantauan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pada 7 April 2026, terdapat perbedaan pandangan di antara para informan mengenai transparansi dalam pelaksanaan program. EK menyatakan:

"Belum pernah mengetahui, karena tidak pernah disampaikan secara digital, apa-apa terus sampailah di finishingnya laporannya belum tahu. Walaupun masyarakat jangan ini itu karena informasinya belum menyeluruh."

Sebaliknya, hasil wawancara dengan Sekretaris BUMDes, JR, pada 28 April 2026 menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes telah dilaksanakan secara terbuka tanpa ada informasi yang ditutupi. Pandangan serupa disampaikan oleh LY yang menjelaskan bahwa informasi mengenai pengelolaan dan kegiatan BUMDes sering disampaikan dalam pertemuan minggon. Hal tersebut juga diperkuat oleh PD yang menyatakan bahwa informasi terkait transparansi anggaran terkadang disampaikan dalam pertemuan minggon dan melalui papan informasi yang tersedia di desa.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa semua informan sepakat bahwa pemerintah desa telah menyediakan saluran untuk transparansi melalui rapat mingguan dan papan pengumuman desa. Namun, terdapat perbedaan persepsi terkait pengungkapan informasi. Informan dari pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menilai bahwa mekanisme transparansi telah berjalan dengan baik, sedangkan sebagian warga merasa bahwa informasi yang mereka terima tidak komprehensif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hambatan terhadap transparansi tidak terletak pada ketersediaan saluran informasi, melainkan pada efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat, sehingga pengawasan partisipatif belum berfungsi secara optimal.

Berdasarkan fungsi manajemen G.R. Terry (Sukarna, 2011), pengawasan yang efektif tidak hanya berfungsi untuk mengukur keberhasilan program, tetapi juga sebagai sarana untuk mengevaluasi dan mengatasi berbagai tantangan yang muncul selama pelaksanaan program. Dalam konteks penelitian ini, mekanisme pengawasan telah diterapkan melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan didukung oleh transparansi. Namun, perbedaan persepsi di antara para informan menunjukkan bahwa efektivitas fungsi pengawasan masih dipengaruhi oleh kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan transparansi merupakan faktor kunci dalam memastikan bahwa pengawasan tidak sekadar bersifat administratif, melainkan juga mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau pelaksanaan program.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan program, tetapi juga oleh mekanisme pengawasan, termasuk pemantauan dan transparansi informasi. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi pengendalian merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa program tetap selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Desa Pusakajaya Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fungsi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* telah dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian, program ketahanan pangan, dan revitalisasi BUMDes. Namun, implementasinya belum sepenuhnya efektif karena masih berorientasi pada pembangunan fisik dan sektor pertanian, sehingga manfaat program belum dirasakan secara merata oleh pelaku UMKM dan masyarakat di luar sektor tersebut. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara perencanaan partisipatif dan pelaksanaan program ekonomi nonpertanian, sementara pengawasan partisipatif belum optimal akibat penyampaian informasi yang belum merata. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas fungsi POAC tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya setiap fungsi manajemen, tetapi juga oleh keterpaduan antarfungsi dalam menghasilkan kesejahteraan yang inklusif. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperkuat diversifikasi ekonomi, mengembangkan unit usaha BUMDes berbasis potensi lokal, meningkatkan dukungan bagi UMKM, serta memperluas transparansi anggaran dan program melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat.

Penelitian ini terbatas pada satu lokasi studi dengan pendekatan kualitatif dan jumlah informan yang terbatas, sehingga temuannya bersifat kontekstual dan belum dapat digeneralisasikan secara luas. Penelitian ini juga belum menggunakan data kuantitatif longitudinal untuk mengukur perubahan pendapatan, tingkat

kemiskinan, kesempatan kerja, dan kontribusi BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan desain komparatif atau metode campuran dengan cakupan wilayah dan partisipan yang lebih luas, serta menguji dampak jangka panjang diversifikasi ekonomi, profesionalisasi tata kelola BUMDes, pengembangan UMKM, dan penerapan transparansi digital terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara inklusif dan berkelanjutan.

Referensi

- Adriani, F. (2024). Strategi pemanfaatan dana desa untuk penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. *Jurnal Economina*, 4(7). <https://doi.org/10.55681/economina.v4i7.1563>
- Ananta, R., Pratama, D. A., & Lestari, S. (2024). Tata kelola dana desa dalam perspektif otonomi daerah dan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 11(2), 140–165.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Luas panen dan produksi padi di Indonesia 2023: Angka sementara*.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh 5,03 persen (c-to-c), ekonomi Indonesia triwulan IV-2024 tumbuh 5,02 persen (y-on-y), dan ekonomi Indonesia triwulan IV-2024 tumbuh 0,53 persen (q-to-q)*.
- Catatan Kantor Desa Pusakajaya Selatan. (2026). *Catatan Kantor Desa Pusakajaya Selatan* [Dokumen internal].
- Umatin, C., Rahmawati, D. A. Z., Al Muiz, M. N., Meinina, R. I., & Nisa, S. K. (2026). Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguat Ekonomi Kreatif di Desa Cengkok Nganjuk. *Jurnal Abdi Nusantara Jelajah Indonesia*, 2(1), 8-16.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Dimuru, A. H. La, & Madjid, L. (2025). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai wujud otonomi asli desa di Desa Wamlana Kecamatan Fenaleisela. *Hipotesa*, 19(1).
- Dwi Bambang Hermawan, A. S. (2026). Optimalisasi penggunaan dana desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Geneng Batealit Jepara. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(7), 2130–2131. <https://doi.org/10.54209/judge.v06i07.2124>
- Fachruzzaman, E. S. A. N. P. P. M. I. C. (2023). Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. *Jurnal Indonesia Raya*, 4(1), 11–16. <https://doi.org/10.37638/indonesiaraya.4.1.11-16>
- Fatam, A., & Kusmiady, R. (2025). Kedudukan desa sebagai subjek pembangunan dalam undang-undang desa terbaru. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 14(1), 1–15.

- Fathah, R. N., & Safitri, T. A. (2022). Pelatihan pelaporan keuangan sederhana dan manajemen keuangan bagi UMKM yang terdaftar di Bank Wakaf Mikro UNISANA. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 73–77.
- Farida, I., Ningsih, L., Aini, N., Kasiari, N., Nurdiana, P., Maharany, S., & A'yun, Q. (2023). Menciptakan Masyarakat Mandiri Secara Sosial Ekonomi Melalui Program Ketahanan Pangan Di Desa Alassapi. *ENGAGEMENT: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 47-54.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296.
- Minang, et al. (2021). *Peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Mulianingsih. (2022). *Pengelolaan BUMDes berbasis potensi lokal*. Literasi Nusantara.
- Rahayu, R., Malawi, I., & Sudarmiani, S. (2025). Dampak home industry anyaman bambu terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. *Journal Social Society*, 5(1), 538–547. <https://doi.org/10.54065/jss.5.1.2025.732>
- Rakhmadian, B., & Arif, L. (2023). Pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa “Ngingas Makmur Abadi” Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Journal Publicuho*, 6(4), 1251–1261. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.252>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Sakdiyah, H., Mariatun, I. L., & Arief, Z. (2022). Efektivitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 14(1). <https://doi.org/10.23887/jjpe.v14i1.48427>
- Saputra, D., Sunarto, I., & Asmuni. (2024). Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dalam pemerataan pembangunan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 6(2), 214–225. <https://doi.org/10.36355/jppd.v6i2.159>
- Sarwono, J. (2006). *Metode penelitian kuantitatif & kualitatif*. Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu.
- Subhan. (2022). *BUMDes sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.

- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Sukarna. (2011). *Dasar-dasar manajemen*. Bandung, Indonesia: Mandar Maju.
- Suryani, T. (2025). Dana desa dan penguatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 12(1), 25–40.
- Laila, W., Mafaaza, N., Ramdhani, K. A., Ermawan, A. B., & Aliudin, A. (2025). Strategi Meningkatkan Hasil Produksi Padi Sawah untuk Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Desa di Banten. *Botani: Publikasi Ilmu Tanaman dan Agribisnis*, 2(2), 219-229. <https://doi.org/10.62951/botani.v2i2.349>
- Yati Afiyanti, I. N. R. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif dalam riset keperawatan* (Edisi ke-1, Cetakan ke-1). Rajawali Pers.